

Analisis Determinan Kemiskinan Sebuah Studi Empiris di Pulau Jawa Tahun 2019-2023

Diana Wijayanti*

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

*Email : diana.wijayanti@uii.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menjelaskan pengaruh teknologi informasi (TIK), *Foreign Direct Investment* (FDI), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domestik Bruto (PDRB) terhadap kemiskinan di enam Propinsi di Pulau Jawa. Metode penelitian menggunakan regresi data panel dengan metode *fixed effect*. Penelitian ini menggunakan empat variabel bebas yaitu Indeks Teknologi (TIK), FDI, IPM dan PDRB, sedangkan variabel terikatnya adalah kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi informasi dan FDI tidak berpengaruh dalam mereduksi kemiskinan di enam propinsi di Pulau Jawa selama periode 2019–2023. Adapun IPM dan PDRB menunjukkan pengaruh yang signifikan dalam penurunan kemiskinan. Hasil temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur dan memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat bagi pemerintah daerah dalam upaya menurunkan kemiskinan khususnya di enam Propinsi di Pulau Jawa.

I. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang masih menjadi tantangan utama di banyak negara karena dampaknya yang luas terhadap perekonomian. Dalam jangka pendek dan panjang, kemiskinan membatasi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan layak, yang menghambat produktivitas serta memperlebar kesenjangan sosial. Secara makro, tingginya tingkat kemiskinan menurunkan daya beli, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan beban fiskal negara. Ketimpangan ini juga berpotensi menimbulkan instabilitas sosial dan politik, yang berdampak negatif terhadap iklim investasi (Todaro & Smith, 2020). Oleh karena itu, upaya pengurangan kemiskinan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat miskin melalui akses terhadap layanan dasar dapat meningkatkan produktivitas nasional dan stabilitas sosial, yang pada akhirnya menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih sehat dan kompetitif (Sabatino et al., 2022).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 masih terdapat jutaan penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif. Tingkat kemiskinan di berbagai Provinsi di Indonesia bervariasi, dengan beberapa provinsi memiliki persentase penduduk miskin yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang lain. Beberapa provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia antara lain Jawa Timur (9,79%), Jawa Barat (7,46%), Jawa Tengah (10,46%), Sumatera Utara (7,99%), Nusa Tenggara Timur (18,48%). Sementara provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia adalah DKI Jakarta (4,3%), Kalimantan Selatan (4,29) dan Bali (4,25) <https://www.bps.go.id/id>. Kemiskinan di Pulau Jawa merupakan isu strategis yang sangat penting karena kawasan ini merupakan pusat kegiatan ekonomi, pemerintahan, dan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia. Meskipun Pulau Jawa menyumbang lebih dari separuh Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, kesenjangan sosial dan ekonomi masih terlihat jelas antara daerah perkotaan dan pedesaan. Tingkat kemiskinan relatif rendah dibanding wilayah lain di Indonesia, namun karena jumlah penduduk yang sangat besar, jumlah absolut penduduk miskin di Pulau Jawa tetap signifikan. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan di Pulau Jawa memiliki dampak besar terhadap pencapaian target pengentasan kemiskinan nasional.

Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan. Secara keseluruhan, teknologi informasi memiliki potensi besar dalam mengurangi kemiskinan melalui peningkatan akses informasi, layanan

keuangan digital, dan peluang ekonomi (Nisa & Budiarti, 2019); (Ishak & Kartasih, 2024); (Tanjung & Rangkuty, 2024); (Zhang et al., 2024). Literasi digital dapat mengurangi risiko rumah tangga yang sebelumnya keluar dari kemiskinan untuk kembali miskin. Ini dicapai melalui peningkatan peluang kerja non-pertanian lokal dan migrasi kerja, serta peningkatan kinerja dan skala usaha wirausaha. Namun, peran literasi digital dalam meningkatkan peluang kerja lebih signifikan dibandingkan dengan kewirausahaan (Zhou et al., 2024). Sebuah studi tujuh kabupaten miskin di Tiongkok menunjukkan bahwa TIK berkontribusi positif terhadap pengurangan kemiskinan, terutama melalui peningkatan migrasi dan pendapatan non-pertanian, daripada peningkatan produksi pertanian (Gu et al., 2023). Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memainkan peran penting dalam upaya pengurangan kemiskinan, terutama di wilayah seperti Pulau Jawa yang memiliki tingkat penetrasi digital yang tinggi. Namun, untuk memaksimalkan manfaat ini, diperlukan kebijakan yang mendukung inklusi digital, pelatihan keterampilan, dan pembangunan infrastruktur TIK, terutama di daerah yang kurang berkembang. Sebagaimana studi yang dilakukan oleh Fatmawati & Aisyah, (2023) yang menunjukkan bahwa teknologi informasi tidak berdampak pada penurunan kemiskinan.

Foreign Direct Investment (FDI) berperan penting dalam pengurangan kemiskinan dengan membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, serta mentransfer teknologi dan keterampilan ke tenaga kerja lokal. Kehadiran perusahaan asing seringkali mendorong pertumbuhan sektor-sektor produktif dan menciptakan efek limpahan ekonomi yang positif bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, dampak ini akan optimal jika negara penerima memiliki kebijakan yang inklusif dan tata kelola yang baik. FDI berkontribusi terhadap peningkatan pembangunan manusia di negara berkembang, yang secara tidak langsung berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan (Reiter & Steensma, 2010); (Adams, 2009). FDI juga berkontribusi terhadap pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan di Afrika Sub-Sahara (Nunnenkamp et al., 2007), yang menekankan pentingnya kebijakan yang tepat agar FDI efektif dalam mengurangi kemiskinan di Amerika Latin.

Kualitas sumber daya manusia yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berperan penting dalam menurunkan kemiskinan karena pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang lebih baik meningkatkan kapasitas individu untuk berpartisipasi secara produktif dalam kegiatan ekonomi. Individu dengan pendidikan tinggi lebih mudah mengakses pekerjaan yang layak dan berpenghasilan lebih tinggi, sementara kesehatan yang baik memungkinkan mereka bekerja secara konsisten dan efisien. Peningkatan IPM secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif yang pada akhirnya menurunkan tingkat kemiskinan (Ranis et al., 2000). IPM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan (Ristika et al., 2021); (Hasibuan, 2023);(Yuniarti & Imaningsih, 2022). Strategi pengentasan kemiskinan dalam konteks pembangunan berkelanjutan ditekankan bahwa pendekatan multidimensi yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi lebih efektif dibandingkan intervensi tunggal (Nzasabayezu et al., 2024). Sistem kesehatan yang efektif dapat mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan kesehatan masyarakat dan memutus siklus antara penyakit dan kemiskinan. Investasi dalam layanan kesehatan dasar dianggap krusial untuk strategi pengentasan kemiskinan (O'Donnell, 2024).

Pertumbuhan ekonomi memiliki dampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada konteks dan kebijakan yang mendukung (Nansadiqa, 2024). Sebuah studi oleh Kumar & Paudel, (2024) di Nepal menemukan bahwa setiap kenaikan 1% dalam PDB per kapita mengurangi tingkat kemiskinan sebesar 0,32%. Penelitian oleh Nyako, (2024) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Nigeria secara signifikan mengurangi kemiskinan dalam jangka pendek dan panjang. Namun, investasi modal yang rendah menghambat dampak positif ini. Namun studi yang dilakukan oleh Wu et al., (2024) menemukan bahwa di Afrika Sub-Sahara, pertumbuhan PDB per kapita tidak secara signifikan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga, hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu diterjemahkan menjadi pengurangan kemiskinan yang efektif. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Muslim et al., (2024) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berdampak terhadap pengurangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada konteks daerah pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan demikian kenaikan PDRB akan berperan penting dalam penurunan kemiskinan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi dengan menggunakan data panel yang meliputi enam provinsi di Pulau Jawa, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY dan Banten. Penggunaan data panel memiliki beberapa keuntungan diantaranya adalah penggabungan data menyebabkan data penelitian lebih banyak dan menghasilkan *degree of freedom* yang besar (**Agus, 2009**).

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kemiskinan yaitu seluruh jumlah penduduk miskin di enam provinsi di Pulau Jawa, dengan satuan ribu orang.

Variabel independent dalam penelitian ini adalah:

1. Teknologi Informasi (TIK), yaitu suatu indikator untuk mengukur perkembangan TIK suatu negara atau wilayah dalam rangka menuju masyarakat informasi. Indeks Pembangunan TIK disusun berdasarkan sebelas indikator yang terhimpun dalam tiga subindeks, yaitu akses dan infrastruktur TIK, penggunaan TIK, serta keahlian TIK sesuai dengan standar internasional yang dikeluarkan oleh International Telecommunication Union (ITU). Nilai indeks dinyatakan dalam skala 0-10
2. *Foreign Direct Investment* (FDI), yaitu Investasi yang dilakukan oleh investor asing secara langsung di suatu daerah, dinyatakan dalam satuan juta US\$
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia. Indeks ini terbentuk dari rata-rata ukur capaian tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur dengan umur harapan hidup saat lahir. Nilai indeks dinyatakan dalam skala 0-1
4. Produk Domestik Bruto (PDRB) yaitu nilai total barang dan jasa akhir yang diproduksi di suatu wilayah selama periode tertentu (satu tahun). PDRB dihitung atas dasar harga konstan 2020 dinyatakan dalam satuan miliar rupiah.

Persamaan model penelitian adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 TIK_{it} + \beta_2 IPM_{it} + \beta_3 FDI_{it} + \beta_4 PDRB_{it} + \epsilon$$

Keterangan:

- Kemiskinan = Jumlah penduduk miskin (Y)
 TIK = Indeks Teknologi (X1)
 FDI = *Foreign Direct Invesment* (X2)
 IPM = Indeks Pembangunan Manusia (X3)
 PDRB = Produk Domestik Bruto (X4)
 β_0 = Konstanta
 $\beta_{1,2,3}$ = Koefisien
 I = *Cross Section* (propinsi)
 t = *Time Series* (tahun)
 ϵ = *error term*

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mendapatkan model terbaik, dilakukan uji Chow dan uji Hausman sebagaimana tabel dibawah

Tabel 1. Hasil Uji Chow dan Uji Hausman

Uji Chow			
Effect test	Statistic	d.f.	Prob
Cross-section f	140.6333797	(5,20)	0.0000
Cross-section Chi-square	107.637320	5	0.0000
Uji Hausman			
Test summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f	Prob.
Cross-section	79.750767	4	0.0000
Random			

Hasil uji chow yang telah dilakukan menunjukan bahwa nilai probabilitas f-statistik sebesar 0.0000 lebih kecil dari tingkat signifikan 10% ($0,0000 < 0,01$). Hal ini berarti menolak H_0 atau menerima H_a sehingga model terbaiknya adalah *fixed effect*, selanjutnya akan dilakukan uji Hausman. Hasil uji Hausman maka diperoleh hasil nilai probabilitas chi-square yaitu sebesar 0,0000 kurang dari 0,1 ($0,0000 < 0,1$) maka hasil keputusannya menolak H_0 dan menerima H_a . Berarti bahwa model terbaik yang terpilih setelah melakukan uji hausman yaitu *fixed effect model*.

Tabel 2 Model Regresi *Random Effect*

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	-1729.022	4343.469	-0.398074	0.6948
TIK	612.8656	438.2362	1.398482	0.1773
FDI	0.012473	0.011987	1.040500	0.3105
IPM	-25.21879	90.94071	2.277310	0.0784
PDRB	-0.001699	0.000633	-2.686770	0.0142

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di wilayah enam propinsi di Pulau Jawa. Hal ini terjadi karena adanya kesenjangan digital masih tinggi di masyarakat. Akses terhadap TIK sering kali terbatas bagi kelompok miskin karena faktor biaya, keterbatasan infrastruktur, dan rendahnya tingkat literasi digital. Akibatnya, manfaat TIK seperti akses informasi, peluang kerja digital, dan layanan keuangan daring tidak sepenuhnya dapat dimanfaatkan oleh kelompok rentan. TIK gagal mencapai kelompok termiskin karena tidak memperhatikan konteks sosial dan ekonomi lokal (Heeks, 2002). Selain itu, Warschauer, (2004) dalam penelitiannya menegaskan bahwa akses terhadap teknologi tanpa dukungan dalam bentuk pendidikan dan infrastruktur tidak cukup untuk mengurangi kemiskinan secara berarti. Penelitian oleh Nisa & Budiarti, (2019) menunjukkan bahwa meskipun Indeks Pembangunan TIK (IP-TIK) meningkat, dampaknya terhadap penurunan kemiskinan tidak merata antar provinsi, terutama di daerah dengan infrastruktur pendukung yang lemah. Selain itu, studi oleh Syahriar, (2006) menekankan bahwa kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola teknologi menjadi faktor utama kegagalan TIK dalam mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu, tanpa dukungan kebijakan yang inklusif dan peningkatan kapasitas masyarakat, TIK berisiko memperdalam ketimpangan sosial daripada menguranginya.

Foreign Direct Investment (FDI) tidak selalu memberikan dampak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di wilayah enam propinsi di Pulau Jawa. Beberapa studi menunjukkan bahwa meskipun FDI dapat

mendorong pertumbuhan ekonomi, manfaatnya seringkali tidak dirasakan oleh kelompok masyarakat miskin. Hal ini disebabkan oleh konsentrasi investasi asing pada sektor-sektor padat modal yang tidak banyak menyerap tenaga kerja lokal berpendidikan rendah. Selain itu, kurangnya integrasi antara perusahaan asing dan ekonomi lokal serta minimnya kebijakan redistributif membuat FDI kurang efektif dalam mengurangi kemiskinan (Delis et al., 2015). Di Afrika Sub-Sahara, FDI memiliki dampak terbatas pada kesejahteraan masyarakat miskin, khususnya di wilayah yang kurang berkembang (Gohou & Soumaré, 2012). Temuan ini menekankan pentingnya kebijakan yang mendukung distribusi manfaat FDI secara lebih merata untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan. Perusahaan asing seringkali beroperasi di wilayah perkotaan atau industri padat modal yang tidak banyak menyerap tenaga kerja miskin, terutama yang berasal dari pedesaan atau berpendidikan rendah.

Kualitas sumberdaya manusia, dalam hal ini IPM memiliki pengaruh signifikan dalam mereduksi tingkat kemiskinan di wilayah enam propinsi di Pulau Jawa. IPM mencerminkan kualitas sumber daya manusia, yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Ketika tingkat pendidikan dan kesehatan penduduk meningkat, produktivitas tenaga kerja juga cenderung naik, sehingga pendapatan akan naik. Prasetyo & Fitanto,(2023) menemukan bahwa IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan, demikian pula, studi oleh Zanzibar et al., (2024) menunjukkan bahwa IPM memiliki pengaruh signifikan dalam mereduksi tingkat kemiskinan.

Produk Domestik Regional Bruto terbukti berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan di wilayah enam propinsi di Pulau Jawa. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berperan penting dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia karena mencerminkan kapasitas ekonomi suatu wilayah dalam menghasilkan barang dan jasa. Peningkatan PDRB umumnya menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperluas akses terhadap layanan dasar, sehingga berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan. Beberapa studi empiris di Indonesia menunjukkan bahwa PDRB memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan (Ksatria et al., 2022); (Suripto & Subayil, 2020).

IV. KESIMPULAN

Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa PDRB dan kualitas sumberdaya manusia (IPM) berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan di wilayah enam propinsi di Pulau Jawa meskipun efektivitasnya sangat tergantung pada distribusi dan kebijakan pendukung seperti investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial. Tanpa kebijakan yang inklusif, hal ini tidak cukup signifikan untuk mengurangi kemiskinan. TIK tidak berdampak pada pengurangan kemiskinan di wilayah enam Propinsi di Pulau Jawa. Hal ini disebabkan adanya kesenjangan digital yang masih tinggi antar wilayah serta keterbatasan akses terhadap TIK bagi kelompok miskin karena faktor biaya, keterbatasan infrastruktur, dan rendahnya tingkat literasi digital. Adapun FDI tidak berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan karena konsentrasi investasi asing pada sektor-sektor padat modal yang tidak banyak menyerap tenaga kerja lokal berpendidikan rendah.

Penelitian mengenai kemiskinan menjadi penting untuk memahami akar permasalahan serta dinamika sosial-ekonomi yang menyertainya. Melalui pendekatan ilmiah, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kemiskinan di suatu wilayah tertentu, menganalisis efektivitas program pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis data. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata dalam upaya pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan.

PUSTAKA

- Adams, S. (2009). Foreign direct investment, domestic investment, and economic growth in Sub-Saharan Africa. *Journal of Policy Modeling*, 31(6), 939–949.
- Agus, W. (2009). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*, Edisi Ketiga. Yogyakarta: Ekonesia.
- Delis, A., Mustika, C., & Umiyati, E. (2015). Pengaruh FDI terhadap kemiskinan dan pengangguran di Indonesia 1993-2013. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 10(1).
- Fatmawati, Y., & Aisyah, S. (2023). Pengaruh Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pengembangan Teknologi Informasi Dan Penanaman Modal Asing Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2019-2021. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(2), 344–353.
- Gohou, G., & Soumaré, I. (2012). Does foreign direct investment reduce poverty in Africa and are there regional differences? *World Development*, 40(1), 75–95.
- Gu, R., Zhang, W., Chen, K., & Nie, F. (2023). Can information and communication technologies contribute to poverty reduction? Evidence from poor counties in China. *Information Technology for Development*, 29(1), 128–150.
- Hasibuan, L. S. (2023). Analisis pengaruh ipm, inflasi, pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 8(1), 53–62.
- Heeks, R. (2002). Information systems and developing countries: Failure, success, and local improvisations. *The Information Society*, 18(2), 101–112.
- Ishak, R. M., & Kartasih, F. (2024). Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Kondisi Sosial Ekonomi terhadap Kemiskinan Indonesia. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 13(3), 193–213.
- Ksatria, I., Istiqomah, I., & Arintoko, A. (2022). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Sektoral Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomikawan*, 22(1), 82–88.
- Kumar, N. K., & Paudel, O. (2024). The Impact of Gdp Growth, Remittance and Urbanization on Poverty Reduction in Nepal. *Janapriya Journal of Interdisciplinary Studies*, 13(1), 182–202.
- Muslim, C., Nur, S., & Muadsin, I. (2024). Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ekonomi Aktual*, 3(3), 81–86.
- Nansadiqa, L. (2024). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(2), 46–60.
- Nisa, K., & Budiarti, W. (2019). Pengaruh teknologi informasi dan komunikasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2012-2017. *2019(1)*, 759–768.
- Nunnenkamp, P., Schweickert, R., & Wiebelt, M. (2007). Distributional effects of FDI: how the interaction of FDI and economic policy affects poor households in Bolivia. *Development Policy Review*, 25(4), 429–450.
- Nyako, N. S. (2024). Role Of Economic Growth In Poverty Reduction In Nigeria. *Journal Of Economics And Allied Research (JEAR)*, 431.
- Nzasabayezu, O., Prakash, S. K. J., & Prasad, R. (2024). A study of poverty alleviation strategies for sustainable development: A scientometric analysis. *Helijon*, 10(13).
- O'Donnell, O. (2024). Health and health system effects on poverty: A narrative review of global evidence. *Health Policy*, 105018.
- Prasetyo, A. G., & Fitanto, B. (2023). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Angka Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Journal Of Development Economic And Social Studies*, 2(4).
- Ranis, G., Stewart, F., & Ramirez, A. (2000). Economic growth and human development. *World Development*, 28(2), 197–219.
- Reiter, S. L., & Steensma, H. K. (2010). Human development and foreign direct investment in developing countries: The influence of FDI policy and corruption. *World Development*, 38(12), 1678–1691.
- Ristik, E. D., Primandhana, W. P., & Wahed, M. (2021). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 12(2), 129–136.

- Sabatino, C., Diaz-Bonilla, C., Aron, D., Haddad, C., Nguyen, M. C., & Wu, H. (2022). *Global Database of Shared Prosperity*.
- Suripto & Subayil, L. (2020). The Effect of Education Level, Unemployment, Economic Growth and Human Development Index on Poverty in Yogyakarta Period 2010-2017. *GROWTH: Scientific Journal of Development Economics*, 1(2), 127–143.
- Syahriar, R. Q. (2006). Peran teknologi informasi dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sains Dan Teknologi Indonesia*, 8(3).
- Tanjung, A., & Rangkuty, D. M. (2024). Analisis Literasi Ekonomi Digital dalam Upaya Menurunkan Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan*, 13(1), 68–79.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development*. Pearson UK.
- Warschauer, M. (2004). *Technology and social inclusion: Rethinking the digital divide*. MIT press.
- Wu, H., Atamanov, A., Bundervoet, T., & Paci, P. (2024). Is economic growth less welfare enhancing in Africa? Evidence from the last forty years. *World Development*, 184, 106759.
- Yuniarti, Q., & Imaningsih, N. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sidoarjo. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 44–52.
- Zanzibar, D., Rahmadhania, F., Kiswanda, R., & Rohmi, M. L. (2024). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Jawa Timur. *Jurnal Economina*, 3(4), 562–574.
- Zhang, J., Wang, D., Ji, M., Yu, K., Qi, M., & Wang, H. (2024). Digital literacy, relative poverty, and common prosperity for rural households. *International Review of Financial Analysis*, 96, 103739.
- Zhou, D., Zha, F., Qiu, W., & Zhang, X. (2024). Does digital literacy reduce the risk of returning to poverty? Evidence from China. *Telecommunications Policy*, 48(6), 102768.